

# **Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo**

Nama penulis, **Aristarkhus Umbar Kristianto**

Universitas Boyolali/Fakultas Hukum/arispati1976@gmail.com

## **Abstrak**

*Tulisan ini membahas dinamika perlawanan masyarakat Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terhadap kebijakan Bupati Sudewo pasca terpilih melalui Pilkada 2024. Kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan PBB-P2 sebesar 250%, serta indikasi manipulasi proyek pembangunan jalan, memicu aksi demonstrasi besar yang menuntut pemakzulan. Artikel ini menganalisis mekanisme pemakzulan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menelaah dasar hukum, prosedur hak angket DPRD, serta peran Mahkamah Agung dalam menentukan sah atau tidaknya pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakzulan kepala daerah tidak bisa serta-merta dilakukan melalui tekanan massa, melainkan harus melalui prosedur hukum yang ketat, mulai dari hak angket DPRD, keputusan paripurna, hingga uji materiil di Mahkamah Agung. Studi ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah.*

*Kata Kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Hak Angket, Hukum Tata Negara, Kabupaten Pati.*

## **Abstract**

*This paper examines the dynamics of resistance by the Pati Regency community, united in the United Pati Community Alliance (AMPB), against Regent Sudewo's policies following his election in the 2024 regional elections. Policies deemed burdensome to the people, such as a 250% increase in PBB-P2 (land tax) and allegations of manipulation of road construction projects, sparked large-scale demonstrations demanding his impeachment. This article analyzes the impeachment mechanism for regional heads under Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, examining the legal basis, the procedures for the Regional People's Representative Council's (DPRD) right of inquiry, and the role of the Supreme Court in determining the validity of violations. The research*

*method used is a juridical-normative approach with a case approach. The results indicate that impeachment of regional heads cannot be carried out simply through mass pressure but must go through strict legal procedures, starting with the DPRD's right of inquiry, plenary decisions, and a judicial review at the Supreme Court. This study emphasizes the importance of the rule of law in maintaining a balance between public aspirations and regional government stability.*

**Keywords:** *Impeachment, Regional Head, Right of Inquiry, Constitutional Law, Pati Regency.*

## 1. Pendahuluan

Kepala daerah memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah sesuai dengan amanat desentralisasi. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul gesekan antara kebijakan kepala daerah dan aspirasi masyarakat. Kasus Bupati Pati, Sudewo, pasca pelantikan pada 20 Februari 2025, menjadi contoh nyata. Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250%, pengelolaan pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak transparan, serta sikap arogansi dalam merespons kritik publik menimbulkan perlawanan sosial yang masif.

Aksi demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 yang diikuti lebih dari 100.000 massa mendorong DPRD Pati menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Bupati. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hak angket DPRD dapat berujung pada pemakzulan kepala daerah? Bagaimana mekanisme hukum yang berlaku?

Tulisan ini mencoba menjawab persoalan tersebut melalui kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) serta menganalisis relevansinya dalam konteks kasus Bupati Pati.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach): menelaah ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 78–80.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach): mengkaji konsep pemakzulan kepala daerah dalam hukum tata negara.

3. Pendekatan Kasus (case approach): menganalisis kasus Bupati Sudewo di Kabupaten Pati sebagai ilustrasi penerapan norma hukum.

Bahan hukum primer adalah UU No. 23 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum tata negara, serta berita/analisis akademisi terkait peristiwa di Pati.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Dasar Hukum Pemakzulan Kepala Daerah**

Menurut Pasal 78 UU Pemda, kepala daerah dapat diberhentikan apabila melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, melakukan perbuatan tercela, atau mendapat sanksi pemberhentian. Proses ini dimulai dari DPRD melalui hak angket (Pasal 79–80), kemudian diputuskan dalam sidang paripurna, dan selanjutnya diuji oleh Mahkamah Agung.

#### **2. Peran Hak Angket DPRD Kabupaten Pati**

Hak angket DPRD adalah instrumen politik hukum untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Dalam kasus Bupati Sudewo, DPRD telah membentuk Pansus Hak Angket dan menemukan 12 poin dugaan pelanggaran, antara lain pembangunan infrastruktur tidak merata, kebijakan pajak daerah yang memberatkan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menjadi dasar untuk mengusulkan pemakzulan.

#### **3. Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah**

Proses pemakzulan harus melalui beberapa tahapan:

- DPRD mengajukan usul pemberhentian dengan kehadiran 3/4 anggota dan persetujuan 2/3 suara.
- Hasil paripurna diserahkan ke Mahkamah Agung untuk diuji apakah pelanggaran benar terjadi.
- Jika terbukti, DPRD mengusulkan pemberhentian ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

#### **4. Analisis Kasus Pati**

Dalam kasus Bupati Sudewo, meskipun terdapat desakan masyarakat yang sangat besar, pemakzulan tidak bisa serta-merta dilakukan hanya melalui aksi demonstrasi. Demonstrasi adalah instrumen demokratis untuk

menyampaikan aspirasi, tetapi pemakzulan harus melewati mekanisme hukum sebagaimana diatur UU. Jika DPRD Pati berhasil mengumpulkan bukti kuat dan Mahkamah Agung menyatakan terbukti adanya pelanggaran sumpah jabatan atau kewajiban, maka pemakzulan bisa dilakukan secara sah.

#### 5. Implikasi Hukum dan Politik

- Secara hukum, mekanisme pemakzulan menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan politik semata.
- Secara politik, tekanan publik dapat memengaruhi DPRD dalam mempercepat proses hak angket.
- Secara sosial, pemakzulan melalui jalur hukum memberikan legitimasi lebih kuat dibanding sekadar desakan massa.

#### 4. Penutup

Kasus desakan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo mencerminkan benturan antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi rakyat. Meskipun gerakan massa menjadi faktor pendorong, pemakzulan kepala daerah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang ketat sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Mekanisme tersebut menegaskan pentingnya peran DPRD, Mahkamah Agung, serta Presiden dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi, supremasi hukum, dan stabilitas pemerintahan daerah.

Dengan demikian, studi kasus ini memberikan pelajaran bahwa demonstrasi adalah bagian dari kontrol sosial, tetapi pemakzulan harus tetap tunduk pada prosedur hukum agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### Daftar Pustaka

##### 1. Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

##### 2. Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Mahfud MD. (2009). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

### 3. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Hak Angket DPRD.

### 4. Artikel dan Laporan Media

Kompas.com, (13/08/2025), Bagaimana Proses Pemakzulan Kepala Daerah?,  
<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/13/17183291/bagaimana-proses-pemakzulan-kepala-daerah>

Krjogja.com, (15 Agustus 2025), 12 Poin Fokus Penyelidikan Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo,  
<https://www.krjogja.com/pantura/1246437033/12-poin-fokus-penyelidikan-pansus-hak-angket-pemakzulan-sudewo?page=3>

Suara.com, (08 Agustus 2025), Bupati Pati Sudewo Ancam yang Ganggu Pemerintahannya, Dikritik Kacang Lupa Kulit,  
<https://www.suara.com/news/2025/08/08/170900/bupati-pati-sudewo-ancam-yang-ganggu-pemerintahannya-dikritik-kacang-lupa-kulit>